

# **Kebijakan Luar Negeri Cina dalam Mengamankan Pasokan Energinya terkait Penolakan Warga Arakan terhadap Kerangka Kerjasama Pembangunan Proyek Pipa Minyak dan Gas Trans-Cina-Myanmar**

**Meylysania Olyvia – 071012041**

*Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga*

## **ABSTRACT**

*In this journal, the authors discuss about the energy cooperation which is held between China and Myanmar in the construction of trans-China-Myanmar oil and gas pipelines project. In the process of energy cooperation, there are some serious problems that occur due to rejection by the Arakan villagers over the construction of the pipelines. The author analyzes China's policy approach through the theory of geopolitics and geoeconomics as a background motive of China hunting energy to Myanmar. For analyzing how China's policy of securing its energy supply, the author uses the theory of good neighbor policy and the 5 variables of the energy security issue which focused on the military variables. Based on the theoretical framework, the authors establish the hypothesis that the Chinese do two different strategies to suppress the rejection by local residents of Arakan, through developmentalist strategy and the strategy of violence. In conclusion, in order to secure the supply of energy resources, China is trying to do everything in both ways, through a gentle way with development programs that have been promised, or in a manner that tended repression through military pressure or violence.*

**Keywords:** *Crisis, Energy, Oil, Gas, China, Myanmar, Pipelines, Security.*

*Dalam jurnal ini, penulis membahas mengenai kerjasama energi yang dijalin antara China dan Myanmar dalam pembangunan proyek pipa minyak dan gas trans China Myanmar. Dalam proses kerjasama energi ini terdapat pokok permasalahan yang terjadi akibat adanya penolakan oleh warga lokal Arakan atas diselenggarakannya proyek pembangunan pipa tersebut. Penulis menganalisis kebijakan Cina melalui teori pendekatan geopolitik dan geokonomi sebagai latar belakang motif Cina dalam mencari energi ke Myanmar. Penulis juga menggunakan teori good neighbor policy dan 5 variabel dalam isu pengamanan energi yang difokuskan pada variabel militer. Kesimpulannya, bahwa dalam rangka mengamankan pasokan sumber daya energinya Cina berusaha melakukan segala cara baik dengan cara yang lembut melalui program pembangunan yang dijanjikannya, ataupun dengan cara yang cenderung represif melalui tekanan militer atau kekerasan.*

**Kata-Kata Kunci:** *Krisis, Energi, Minyak, Gas, China, Myanmar, Pipa, Pengamanan.*

Di balik pembangunan ekonomi Cina yang begitu pesat pada dua periode terakhir, terdapat fakta mengenai permasalahan krisis energi yang dihadapi oleh pemerintah dalam negerinya. Berdasarkan data yang dirilis oleh World Bank pada tahun 2003, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Cina tercatat mengalami pertumbuhan sebanyak 10 persen dalam setahun pada periode tahun 1990-2001.<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi ini terbilang cukup tinggi,<sup>2</sup> didasarkan pada jumlah *foreign direct investment* (FDI) Cina yang berada pada angka 19,36 miliar USD pada 1990-1995. Kenaikan angka FDI-nya pun terus meningkat pada tahun 1996-2001 yang tercatat berada pada tingkat 42,684 miliar USD. Kalkulasi FDI Cina yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu tersebut didukung dengan kegiatan ekonomi dari sektor ekspor impor senilai 509,722 miliar USD pada tahun 2001.<sup>3</sup>

Tingginya arus kemajuan perekonomian Cina mengalami permasalahan ketika Cina kekurangan sumber daya energi, yang mana energi merupakan poin fundamental utama bagi berjalannya aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang dialami Cina sekiranya berimplikasi pada kondisi suplai energi dalam negerinya. Besarnya jumlah energi yang dibutuhkan yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokalnya membuat laju pertumbuhan ekonomi Cina menjadi terhambat. Berangkat dari data yang disebutkan oleh Kambara dan Howe, Cina terhitung memiliki selisih permintaan yang besar antara jumlah yang dihasilkan dengan jumlah yang dibutuhkan. Jumlah produksi sumber daya energi minyak Cina sendiri mengalami penurunan dari waktu ke waktu, hingga saat ini penurunannya tercatat sebesar 3,5 juta barrel per hari. Jumlah produksi minyak ini tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan Cina, yang menghabiskan 8,2 persen dari keseluruhan konsumsi minyak global, sedangkan produksi minyak domestiknya hanya dapat mensuplai 4,2 persen saja bagi kebutuhan minyak global.<sup>4</sup>

Dari tahun 1993 hingga 2009, konsumsi terhadap sumber daya minyak terus meningkat sebanyak 8 juta barrel setiap harinya dibanding konsumsi sebelumnya yang hanya sejumlah 2,5 juta barrel per hari. Kenaikan jumlah permintaan terhadap konsumsi minyak dan gas ini, bertolak belakang dengan jumlah produksi energi minyak dan gas yang dapat diproduksi oleh Cina. Menurut data statistik yang disebutkan oleh Mubah dalam jurnalnya yang berjudul "Ancaman Krisis Energi di Balik

---

<sup>1</sup> Tatsu kambara dan Howe Christopher, *Cina and the Global Energy Crisis*, (Northampton: Edward Elgar, 2007).

<sup>2</sup> Yue, (2004), 51-53 dalam Safril A. Mubah, "Ancaman Krisis Energi di Balik Kebangkitan Ekonomi Cina," *Jurnal Global dan Strategis* 5:2 (2011).

<sup>3</sup> Safril A. Mubah, "Ancaman Krisis Energi di Balik Kebangkitan Ekonomi Cina," *Jurnal Global dan Strategis* 5:2 (2011).

<sup>4</sup> Tatsu kambara dan Howe Christopher, *Cina and the Global Energy Crisis*, Northampton: Edward Elgar, 2007.

Kebangkitan Ekonomi Cina”, Cina hanya mampu memproduksi sumber daya minyak dan gas sebanyak 2-3 juta liter per hari saja. Angka ini tentunya tidak mencukupi total kebutuhan institusi perekonomian dan aktifitas ekonomi masyarakat Cina yang membutuhkan sekurangnya 8 juta barrel per hari. Hal ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa produksi domestik Cina hanya dapat memenuhi sepertiga dari total kebutuhan sumber daya minyak dan gas yang harus dipenuhi Cina melalui jalur impor.<sup>5</sup>

Dalam rangka memenuhi kekurangan terhadap sumber dayanya, Cina harus melakukan pencarian sumber daya energi yang mereka butuhkan dari wilayah negara lain. Hal ini terlihat dengan kebijakan pemerintah Cina yang mendorong korporasi dalam negerinya untuk melakukan investasi dan kerjasama dengan negara penghasil sumber minyak sekaligus juga melakukan upaya pengamanan untuk menjamin terpenuhinya suplai energi yang akan masuk ke negaranya. Beberapa kerjasama yang telah dijalin Cina dalam beberapa waktu terakhir ini dilakukan dengan negara- negara kaya sumber daya energi seperti negara- negara pecahan Uni Soviet yang memiliki perbatasan langsung dengan Cina, yakni Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan dan Turkmenistan. Negara- negara lain yang menjalin hubungan kerjasama energi, diantaranya adalah Sudan dan negara- negara Afrika lainnya, beserta dengan negara kawan dekat Cina di Asia tenggara, yakni Myanmar. Penjalinan hubungan kerjasama dengan banyak negara ini dimaksudkan Cina sebagai suatu upaya untuk membangun peta jalur distribusi minyak dan gas dari wilayah Timur Tengah hingga Afrika yang kemudian menyambung ke Lautan Hindia dan masuk ke wilayah Cina melalui Myanmar. Dari sini dapat dilihat bahwa posisi pembangunan pipa minyak dan gas yang terbujur dari wilayah Arakan di Samudra Hindia hingga ke Provinsi Yunan di selatan Cina menjadi komponen penting dalam kesatuan distribusi pembangunan jalur minyak dan gas tersebut.<sup>6</sup>

### **Kerjasama Cina Myanmar dalam Pembangunan Pipa Minyak dan Gas**

Kerjasama bilateral antara Cina dan Myanmar berhasil dijalin melalui pembangunan mega proyek pipa minyak dan gas trans-Cina-Myanmar. Pada tahun 2004, *Cina National Petroleum Corporation* (CNPC) berhasil melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan minyak Myanmar, yakni *Myanmar Oil and Gas Enterprise* (MOGE). Kedua

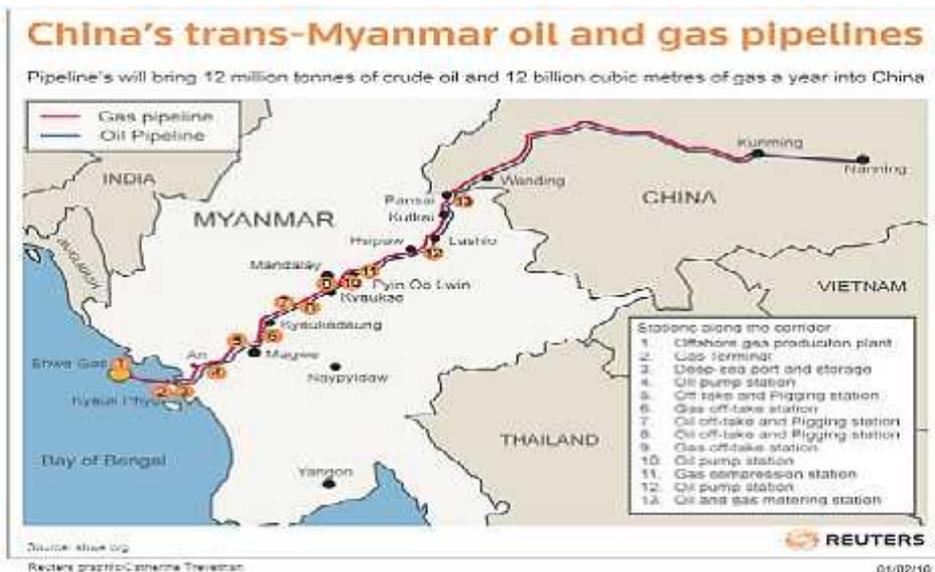
---

<sup>5</sup> Safril A. Mubah, “Ancaman Krisis Energi di Balik Kebangkitan Ekonomi Cina,” *Jurnal Global dan Strategis* 5:2 (2011).

<sup>6</sup> Safril A. Mubah, “Ancaman Krisis Energi”, 2011.

perusahaan ini sepakat untuk menandatangani MoU pembangunan jaringan pipa yang menyalurkan sumber daya minyak dan gas dari wilayah Arakan, Myanmar. Struktur jaringan pipa gas tersebut dibangun melalui wilayah Kyaukphyu Port di wilayah Rakhine menuju ke Provinsi Yunan di Cina. Pipa sepanjang 620 mil tersebut mengandung nilai investasi sebesar USD 2,5 miliar.<sup>7</sup> Kerjasama di antara kedua perusahaan ini berupa kontrak alur pembelian minyak dan gas lintas negara yang ditujukan untuk memenuhi suplai permintaan sumber daya minyak dan gas alam dari Cina. Kontrak kerjasama ini sekiranya akan berjalan selama 30 tahun, yang mana CNPC menjadi pengelola dominan didasarkan pada kepemilikan saham investasi sebesar 50,9%, sedangkan sisanya dimiliki oleh MOGE.<sup>8</sup>

**Gambar 1. Jalur Pipa Minyak dan Gas Trans Cina-Myanmar<sup>9</sup>**



Pada November 2008, pemerintah junta militer Myanmar berhasil meraih kesepakatan dengan pemerintah Cina untuk membangun pipa gas dan minyak bumi yang akan dibangun secara paralel melintasi kilang minyak lepas pantai Shwe Field di kawasan Kyaukphyu dan akan selesai di wilayah Kunming, Cina.<sup>10</sup> Pembangunan pipa tersebut akan memotong wilayah Myanmar hingga ke Cina dengan melewati beberapa

<sup>7</sup> Jusman Dalle, *Dalang Lain Tragedi Rohingnya*, <http://jusman-dalle.blogspot.com/2012/08/opini-jawa-pos-dalang-lain-tragedi.html>, (diakses pada 21 Maret 2013), 2012.

<sup>8</sup> Anonim, <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135851-T%2028013-Kajian%20mengenai-Metodologi.pdf>, (diakses pada 21 Maret 2013), t.t.

<sup>9</sup> Anonim, <http://moneymorning.com>.

<sup>10</sup> Anonim, t.t.

daerah, seperti Mandalay, Lashi, dan Muse. Bangunan pipa bawah tanah tersebut akan memasuki Cina dengan melalui kota-kota, seperti Kunming, Guizhou dan Guangxi.<sup>11</sup> Pipa minyak dan gas alam tersebut berkapasitas sekitar 12 juta liter kubik minyak mentah per tahun, dan dapat menghabiskan dana sebesar USD 2,5 juta. Pembangunan jalur pipa ini dimaksudkan untuk memotong jalur distribusi minyak dan gas alam yang biasanya, yang mana biasanya harus melalui Selat Malaka. Pembangunan ini tentunya berdampak pada perubahan peta jalur pendistribusian gas dan minyak alam ini, sebagaimana diungkapkan, bahwa “Jalur pipa ini akan mengubah rute impor minyak mentah Cina dari Timur Tengah dan Afrika serta menghindari kemacetan yang sering terjadi di Selat Malaka.”<sup>12</sup> Selain alasan kemacetan yang terjadi di Selat Malaka, alasan lain yang membuat Cina memilih wilayah Myanmar sebagai jalur distribusi barunya dikaitkan dengan pengamanan jalur minyak Cina dari wilayah Timur Tengah yang banyak mengalami gangguan dari negara-negara kompetitor seperti militer Amerika Serikat yang beroperasi di lautan Malaka.<sup>13</sup>

Dari kerjasama energi ini, Myanmar memiliki posisi yang cukup penting bagi Cina sebagai jembatan yang menghubungkan masuknya pasokan energi pipa dan gas ke Cina. Wilayah Rakhine yang berada di sebelah Barat Myanmar menjadi pintu masuk jalur pipa gas tersebut dari wilayah Lautan Hindia. Rakhine merupakan suatu wilayah penting bagi Myanmar karena posisinya yang berfungsi sebagai batas pertahanan Myanmar. Sebagai wilayah *frontier*, Rakhine seharusnya dikondisikan sebagai suatu wilayah yang aman. Selain itu, Rakhine memegang peranan penting bagi kelancaran distribusi pipa minyak dan gas Cina memiliki peranan penting dalam menjamin kelancaran proses distribusi pasokan energi ini. Namun kondisi wilayah Rakhine sendiri berada pada situasi yang tidak kondusif karena warga di wilayah Rakhine menolak proyek pembangunan pipa gas tersebut.<sup>14</sup>

### **Bentuk Protes dari Warga Arakan**

Pada tanggal 28 Oktober 2009 kelompok demonstran dari Myanmar yang terdiri dari aliansi Kongres Pemuda dan Mahasiswa Arakan, Arakan Oil Watch, Gerakan Shwe Bangladesh dan Gerakan Gas Shwe India menyuarakan penolakan keras terhadap proyek pembangunan

---

<sup>11</sup> Anonim, t.t.

<sup>12</sup> Anonim, t.t.

<sup>13</sup> Shirk, 2007:293 dalam Safril A. Mubah, “Ancaman Krisis Energi di Balik Kebangkitan Ekonomi Cina,” *Jurnal Global dan Strategis* 5:2 (2011).

<sup>14</sup> Andrew T.H. Tan, “Ethnic Conflict in Burma: from Separatism to Federalism”, dalam *A Handbook of Terrorism and Insurgencies in Southeast Asia*, (Northampton: Edward Elgar Publishing Inc., 2007).

pipa gas dari perusahaan Shwe Cina. Kelompok aktivis ini mengirimkan surat terbuka yang ditujukan kepada Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Hu Jintao melalui 12 kedutaan Cina di seluruh dunia. Surat tersebut berisikan dampak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat Rakhine jika proyek pembangunan pipa gas tersebut tetap dilaksanakan. Dua dampak negatif tersebut terkait dengan semakin kuatnya kekuatan militer pemerintah Myanmar dan hal tersebut akan berbanding lurus dengan tingginya angka pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Kerjasama energi yang dijalankan perusahaan minyak asal Cina, yaitu CNPC dan MOGE akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti tuntutan kerja paksa, isu degradasi lingkungan, kehilangan mata pencaharian, perampasan tanah dan tindak pemerkosaan terhadap perempuan. Kerugian yang dirasakan oleh masyarakat ini tidak berbanding lurus dengan keuntungan besar yang diperoleh oleh Rezim militer Myanmar yang akan menerima lebih dari US\$ 800 juta setiap bulan dari proyek pembangunan pipa minyak dan gas di Myanmar. Penghasilan yang didapat melalui kerjasama energi ini tidak pernah menyentuh rakyat dan rakyat pun tidak mendapatkan dampak pembangunan serta kompensasi yang memadai dari proyek pembangunan pipa minyak dan gas tersebut.<sup>15</sup> Berangkat dari keadaan yang timpang ini, tentu saja kondisi di Arakan memiliki peluang mengganggu kelancaran proyek distribusi pipa minyak dan gas trans Cina dan Myanmar. Gangguan tersebut berasal dari kaum oposisi dan resistan dari penduduk lokal yang menolak proyek pembangunan tersebut karena dianggap merugikan bagi mereka. Melihat pergerakan kaum oposisi dari penduduk lokal hal ini membuat Cina perlu melakukan beberapa cara dan kebijakan untuk menekan kaum resistan dan penolakan yang terjadi di Arakan agar kegiatan distribusi energi minyak dan gasnya tidak terganggu.

### **Alasan Penolakan Warga Arakan terhadap Pembangunan Proyek Pipa Minyak dan Gas**

Kerjasama energi dalam proses pembangunan proyek pipa minyak dan gas yang menghubungkan Cina dan Myanmar mengalami banyak tantangan dan rintangan dari berbagai pihak. Terdapat banyak hal yang melatarbelakangi aksi penolakan dari penduduk lokal Myanmar di wilayah rute pipa tersebut dibangun. Selain bermasalah dengan penduduk lokal, pembangunan pipa minyak dan gas ini juga mendapat kecaman dari aktivis hak asasi dan kemanusiaan internasional karena rezim otoriter Myanmar. Berikut ini akan dijelaskan dua faktor umum yang melatarbelakangi penolakan yang dilakukan oleh warga lokal

---

<sup>15</sup> Nava Thakuria, *Aktivis Myanmar Tolak Pipa Minyak Cina*. <http://erabaru.net> (diakses pada 03 Oktober 2013), 2009.

Arakan. Faktor tersebut terdiri dari faktor ekonomi dan faktor hak asasi kemanusiaan.

Pada Faktor Ekonomi terdapat beberapa alasan mengapa warga setempat menolak pembangunan proyek pipa tersebut. Alasan- alasan tersebut terdiri dari permasalahan keterlambatan program pembangunan, permasalahan gaji buruh, dan penyitaan tanah. Dala permasalahan keterlambatan program pembangunan, diawali dari keecawaan warga setempat yang tidak kunjung mendapatkan pembangunan yang telah dijanjikan oleh kedua pihak. Pemerintah Myanmar tidak pernah memaparkan secara transparan jumlah pendapatan negara yang didapat dari kegiatan ekspor minyaknya dan bagaimana negara mengalokasikan pendapatan tersebut untuk pembangunan Myanmar. Ibu kotanya, Rangoon hanya dapat merasakan listrik dalam waktu 10 jam saja per harinya. Selain itu 60% penduduk pedesaan Myanmar mengalami kekurangan listrik dan menggunakan daya generator yang hanya mampu menyala 3 jam saja dalam kehidupan sehari-harinya. Keadaan masyarakat Myanmar yang kekurangan energi ini bertolak belakang dengan kapasitas sumber daya Myanmar yang melimpah terutama di sektor penghasil minyak dan gas. Namun patut disayangkan ladang gas milik Shwe tidak terhubung dengan jaringan listrik nasional.

Selain masalah keterlambatan program pembangunan, permasalahan lain terkait gaji buruh tidak memadai juga turut timbul selama proses pembangunan pipa tersebut. Masyarakat lokal menilai bahwa pihak pengembang terbilang gagal dalam memberikan kompensasi yang memadai, seperti permasalahan gaji bagi masyarakat lokal Arakan. Gaji para pekerja yang bekerja bagi pembangunan proyek ini dibayar hanya sekitar sepertiga saja dari nominal yang tercantum dalam kontrak mereka. Selain itu, warga juga menuntut ganti rugi atas tanah yang diambil alih bagi pembagunan proyek pipa gas ini yang tidak pernah mendapat kompensasi dari pihak pengembang yaitu, CNPC dan MOGE.<sup>16</sup> Beberapa contoh tindakan perampasan tanah tanpa kompensasi yang terjadi di Maday Island, dimana terdapat 56 orang warga kehilangan sekitar 60 hektar lahan pertanian yang diperutukkan bagi keperluan pembuatan jalan bagi fasilitas penyimpanan gas alam. Hingga pembangunan proyek tersebut selesai penduduk desa belum menerima kompensasi.

Alasan mengapa warga Arakan menolak pembangunan pipa minyak dan gas ini dilatarbelakangi pula oleh faktor hak asasi manusia. Banyak kelompok hak asasi manusia menyerukan protes kepada pemerintah Cina untuk menghentikan investasinya dan pengerjaan proyek pipa gas

---

<sup>16</sup> Anonim, *Pipeline in Arakan Draws Protest*, <http://www.irrawaddy.org>, (diakses pada 29 November 2013), 2013.

tersebut. Protes ini timbul akibat adanya kekhawatiran dari banyak kelompok hak asasi manusia terhadap adanya tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh dua korporasi minyak nasional Cina dan Myanmar, yakni CNPC dan MOGE. Kekhawatiran terhadap pelanggaran HAM ini sendiri berdasarkan pada informasi di lapangan yang menyatakan bahwa pihak CNPC ataupun MOGE tidak memberikan kompensasi yang memadai terhadap penduduk lokal yang tanahnya diambil untuk pemasangan jalur pipa gas di wilayah Arakan.<sup>17</sup> Hingga saat ini telah ditemui beberapa bentuk pelanggaran mencakup tindakan perampasan tanah, kompensasi yang tidak memadai, dan kurangnya stimulus atau bantuan ekonomi dari pemerintah lokal termasuk dari pihak Cina sendiri, kemudian menyangkut permintaan ijin atau persetujuan dari warga setempat untuk melakukan proyek di tanah tempat tinggal mereka cenderung dilupakan dan tidak dilakukan oleh pihak korporasi terkait. Selain pelanggaran di atas masih terdapat pelanggaran lain, seperti tindakan pelecehan dan intimidasi oleh aparat negara, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan, serta kerja paksa oleh warga setempat terkait dengan pengerjaan proyek.<sup>18</sup>

### **Analisis Geopolitik dan Geoekonomi Motif Pencarian Energi Cina**

Dalam melihat arah kebijakan luar negeri Cina yang mengejar kekurangan terhadap konsumsi dalam negerinya, fenomena ini dapat dianalisa melalui pendekatan geopolitik. Geopolitik merupakan suatu studi yang mempelajari mengenai pengaruh geografi yang terdiri dari dua aspek umum, yakni manusia dan fisik pada politik internasional dan hubungannya antar negara di dalamnya.<sup>19</sup> Melalui studi ini diperoleh analisis mengenai kebijakan luar negeri suatu negara yang berusaha untuk dipahami, dijelaskan, dan diprediksi, bahwasanya aspek geografis dapat mempengaruhi perilaku internasional. Aspek geografis dapat terdiri dari bermacam-macam bentuk, yang variabel geografisnya, terdiri dari aspek lokasi fisik, ukuran, iklim, topografi, demografi, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.<sup>20</sup> Definisi geopolitik yang disebutkan oleh Kjellen yang menyebutkan bahwa, "geopolitics is the theory of the geographical organism or phenomenon in space."<sup>21</sup> Secara tradisional, penggunaan istilah geopolitik digunakan untuk

---

<sup>17</sup> Ron Corben, *Rights Groups Call for Cina to Halt Construction of Pipeline in Myanmar*, <http://www.oilwatch.org>, (diakses pada 29 November 2013), 2009.

<sup>18</sup> Anonim, *The Myanmar-Cina Pipelines*, 2011.

<sup>19</sup> Devetak et al., *An Introduction to International Relations*, 2012, 492.

<sup>20</sup> Evans, G dan Newnham, J., *The Penguin Dictionary of International Relations*. (Penguin books, London, UK, 1998)

<sup>21</sup> Saul Bernard Cohen, *Geopolitical Structure and Theory in Geopolitics of the World System*, (London: Rowman and Little Publisher, 2003), 33-61.

mengamati dampak politik terhadap suatu variabel geografis, namun seiring berjalannya waktu dan perubahan struktur sosial maka penggunaan kata geopolitik sudah berubah untuk mencakup area konotasi yang lebih luas.

Sebagai perpanjangan dari pemikiran geopolitik, dalam menganalisa motif Cina pada kerjasama dengan Myanmar juga dapat didasarkan pada konsep pemikiran geoekonomi klasik, yang mana dapat dijabarkan melalui beberapa indikator yang kesemuanya menyimpulkan akan peran penting energi bagi keberlangsungan suatu negara. Dalam pemikiran geoekonomi klasik, prioritas utama yang dipentingkan oleh suatu negara adalah energi. Energi menjadi isu krusial, karena keberadaan sumber daya alam diperuntukkan bagi kemakmuran jangka panjang dan bersifat lebih penting dibanding banyaknya jaringan atau inovasi teknologi. Selain itu, dalam hal kontrol pada faktor produksi, berdasar pada pendekatan geoekonomi klasik lebih condong untuk melakukan upaya pengamanan akan masuknya energi dari wilayah negara lain daripada mengamankan buruh dan modal. Pemikiran geoekonomi klasik menanggapi globalisasi sebagai bentuk dari imperialisme kuno, yang mana perluasan ekspansi ke negara lain ditujukan untuk memperbanyak pasar dan pencarian sumber daya alam khususnya energi. Dalam memastikan ketersediaan pasokan energinya tersebut, pandangan geoekonomi klasik ini mendukung peran negara sebagai pihak yang berwenang melakukan pembangunan dan pengaturan terhadap sumber daya energi yang masuk. Tipe konflik yang biasa terjadi menurut paradigma ini, akan berkaitan dengan permasalahan konflik sumber daya, isu kelangkaan, kontrol tanah dan akuisisi, serta perubahan rezim. Penentuan *heartland* yang digunakan dalam perspektif ini berkaitan dengan sektor ekstrak, pipa energi dan minyak dan sumber daya gas. Penentuan *pivot area* menurut pandangan geoekonomi klasik dipusatkan pada wilayah Timur Tengah, Afrika, Laut Kaspia dan Asia Tenggara.<sup>22</sup>

### **Kebijakan Luar Negeri: *Good Neighbor Policy* dan *Energy Diplomacy***

Berangkat dari kerangka pemikiran geopolitik dan geoekonomi yang berkaitan erat dengan arah kebijakan luar negeri, dalam rangka menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan apa yang akan dilakukan Cina dalam melakukan pengamanan terhadap pasokan energinya di wilayah Arakan maka penulis mengambil teori terkait dengan kebijakan luar negeri. Pemikiran geoekonomi dan geopolitik di

---

<sup>22</sup> Joko Susanto, Kuliaah Geopolitics of The New Emergent Economics Minggu XII: Geopolitics and Geoeconomics, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, 2013.

atas yang mendasari motif Cina dalam melakukan kerjasama energi dengan Myanmar, menyiratkan suatu arah kebijakan luar negeri yang telah ditentukan oleh Cina dalam menjaga hubungan kerjasama bilateral yang kondusif dengan Myanmar. Politik luar negeri menurut Charles Hermann diartikan sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan merupakan hasil dari serangkaian mekanisme politik individu ataupun kelompok individu.<sup>23</sup> Selain itu Hermann juga mengidentifikasi politik luar negeri sebagai suatu tindakan yang mencerminkan perilaku dari suatu negara. Perilaku negara ini dijelaskan secara lebih lanjut dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kompleksitas politik luar negeri itu sendiri. Dari sini kita dapat melihat bahwa penentuan keputusan politik luar negeri dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain faktor kelompok dalam lingkungan kekuasaan, faktor psikologis, faktor internasional dan faktor domestik. Politik luar negeri merupakan suatu strategi pemerintah untuk memperoleh tujuan atau kepentingan negaranya dalam hubungan dengan entitas eksternal.<sup>24</sup>

Kebijakan luar negeri Cina terkait dengan proses pencarian dan sekurisasi energinya terdiri dari tiga elemen utama, yang terdiri dari: *great power diplomacy*, *good neighbor or peripheral diplomacy*, dan *energy or resource diplomacy*.<sup>25</sup> Dari ketiga bentuk kebijakan luar negeri tersebut, Cina melakukan dua strategi kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan penjalinan hubungan baik dengan tetangga terdekat dan juga mengupayakan kerjasama yang baik dalam bidang energi, sebagai suatu aplikasi dari pemenuhan kebutuhan nasional Cina akan sumber daya energi. Cina menggunakan strategi *good neighbor or peripheral diplomacy*, yang mana melalui mode diplomasi ini Cina berupaya untuk menjalin kerjasama yang baik dengan negara tetangga di sekitarnya, seperti negara-negara di wilayah Asia Tenggara dan Asia tengah. Hubungan diplomatis yang dijalin Cina dengan negara tetangganya tidak hanya berfokus pada penjalinan hubungan diplomatis melainkan Cina berusaha untuk turut membangun kerjasama ekonomi di antara negara-negara tetangganya, sebagai salah satu cara untuk mereduksi permasalahan perbatasan dan untuk meningkatkan kepercayaan antara masing-masing negara sehingga secara tidak langsung hubungan diplomatis ini membuka kesempatan yang baik pula bagi kerjasama ekonomi yang menguntungkan bagi semua pihak.<sup>26</sup> Selain itu, pemerintah Cina juga melakukan strategi lain, yakni *energy diplomacy*. Model diplomasi energi merupakan salah satu bentuk

---

<sup>23</sup> Laura Neack, *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era*, (Maryland: Rowman & Littlefield Publisher, 2008), 26

<sup>24</sup> Valerie M. Hudson, "The History and Evolution of Foreign Policy Analysis," dalam *Foreign Policy: Theories; Actor; Case*, ed. Steve Smith et al. (New York: Oxford University Press, 2008), 12.

<sup>25</sup> Kang Wu dan Ian Storey, *Cina in the Global Capitalist System*, 197.

<sup>26</sup> Kang Wu dan Ian Storey, *Cina in the Global Capitalist System*, 197.

diplomasi baru yang digunakan pada abad ke-21 ini. Bentuk diplomasi ini lahir karena isu kelangkaan energi yang banyak mengancam negara-negara di dunia, termasuk Cina yang memiliki aktivitas produksi tinggi. Seperti *heading* utama dari diplomasi energi ini, model diplomasi ini dikhususkan pada hubungan bilateral ataupun multilateral menyangkut proses jual beli energi di antara beberapa pihak atau negara yang berkaitan.<sup>27</sup>

### **Dimensi Isu Pengamanan Energi**

Berkaitan dengan dua model kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina terkait dengan pemenuhan kebutuhan akan sumber daya energi, secara umum terdapat empat dimensi dalam isu pengamanan energi. Dimensi isu pengamanan energi yang berkaitan dalam kasus hubungan kerjasama bilateral antara dua negara ini dapat dijelaskan melalui dimensi geopolitik. Dalam dimensi ini diplomasi energi memegang peranan penting dalam memastikan pasokan energi yang akan masuk ke Cina. Berkesinambungan dari dimensi geopolitik kebijakan luar negeri Cina dalam pengamanan pasokan energi ini dijelaskan dalam dimensi militer atau keamanan nasional. Melalui dua dimensi ini didapatkan kerangka berpikir bahwa energi menjadi komponen penting dalam merumuskan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional suatu negara. Dalam hal yang lebih signifikan seperti dalam menghadapi fenomena penolakan yang terjadi di ladang minyak Cina di Arakan, Cina melakukan beberapa cara lain dalam rangka menjaga keamanan di daerah dibangunnya proyek pipa distribusi minyak dan gasnya. Dalam menghadapi penolakan ini, Cina nampak menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah junta militer Myanmar dan dalam aplikasinya kedua pemerintah otoriter ini cenderung mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang cukup keras dan otoriter terkait dengan pengadaan kekuatan militer sebagai instrumen penjaga kelancaran distribusi energi di antara kedua negara ini.

### **Strategi Cina dalam Melakukan Pengamanan Energinya terhadap Penolakan Warga Arakan**

Beberapa langkah Cina dalam mengantisipasi penolakan masyarakat Myanmar terkait dengan pembangunan pipa gas tersebut diupayakan dalam dua strategi berbeda yang terdiri dari strategi *developmentalis* dan strategi kekerasan. Kedua strategi ini sengaja diupayakan oleh Cina untuk memaksimalkan pengamanan pasokan energinya di Arakan, dimana Cina melakukan segala upaya untuk mereduksi bentuk

---

<sup>27</sup> Kang Wu dan Ian Storey, *Cina in the Global Capitalist System*, 197.

penolakan atau protes dari warga setempat dengan cara yang halus ataupun dengan cara yang cenderung koersif. Dalam rangka melakukan upaya pengamanan pasokan sumber daya energinya Cina melakukan beberapa cara untuk menekan aksi penolakan yang dilakukan oleh warga Arakan. Sebagai salah satu hasil implementasi dari kebijakan *good neighbor policy*, Cina melakukan program pembangunan di area sepanjang jalur pipa minyak dan gas. Program pembangunan *Special Economic Zone* (SEZ) ini ditujukan bagi peningkatan kondisi infrastruktur Myanmar khususnya di Arakan yang dapat membantu warga setempat untuk tumbuh dan berkembang dilihat dari segi peningkatan ekonomi. Dan melalui kebijakan inilah Cina menerapkan strategi developmentalis dalam melakukan pegeanaan terhadap pasokan energinya.

Strategi berikutnya yang dilakukan oleh Cina dalam rangka mengamankan pasokan energinya ditempuh melalui strategi kekerasan. Dalam proyek pembangunan pipa minyak dan gas Trans Cina- Myanmar ini, Cina melakukan proses penempatan militer di beberapa wilayah Myanmar yang menjadi lokasi pembangunan pipa gas milik CNPC ini dibangun. Pembangunan proyek pipa gas ini dikatakan dalam Earth Right, menyebabkan kenaikan signifikan pada pengadaan jumlah tentara angkatan darat, angkatan laut, dan juga polisi di wilayah proyek konstruksi pembangunan pipa minyak dan gas.<sup>28</sup> Kontrak penjaminan keamanan ini diikuti pula dengan kerjasama militer yang telah lama dijalin antara Myanmar dan negara tirai bambu Cina. Bersamaan dengan kerjasama energi, Cina berupaya memberikan bantuan kepada pemerintah junta militer Myanmar untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas dari pasukan keamanan Myanmar. Hal ini terlihat dari pembangunan pangkalan militer yang bertempat di kawasan Arakan Yoma, tepatnya di Ann.<sup>29</sup> Beberapa hal lain yang dilakukan oleh kerjasama korporasi minyak dan gas Cina Myanmar dalam meredam aksi penolakan warga terhadap proyek pipa gas ini dilakukan melalui aksi penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan yang dilakukan oleh personel militer Myanmar terhadap warga yang bersikap resistan. Beberapa kasus yang sempat ditangkap oleh para aktivis kemanusiaan membuktikan terjadinya penculikan dan tindak kekerasan dari kelompok otoritas terhadap beberapa pelajar di wilayah Sitwe yang merupakan salah satu tempat yang berada dalam regional Arakan. Pelajar-pelajar tersebut diculik dan ditangkap atas tuduhan dicatat sebagai kaum oposisi terhadap proyek pipa gas tersebut.

---

<sup>28</sup> Anonim. *The Myanmar-Cina Pipelines: Human Right Violations, Aplicable Law, and revenue Secrecy*. Dalam EarthRight International Situation Briefer No. 1. March 2011.

<sup>29</sup> Anonim, *Massive Military Built Up at Ann (Arakan), and (Than) Shwe Gas Project*, <http://ann-arakan-military-builtup.blogspot.com/>, (diakses pada 22 Desember 2013), 2011.

## **Kesimpulan**

Dengan demikian telah jelas bahwa dalam memastikan kelancaran pasokan energi minyak dan gasnya, Cina melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Politik luar negeri yang digunakan Cina baik dalam mengatasi kekurangan sumber daya dan penolakan terhadap pembangunan pipa minyak dan gas ini juga berkaitan dengan sikap negara Cina dalam menentukan perilaku dalam mencapai tujuan ataupun kepentingannya. Strategi pengamanan tersebut ditempuh melalui dua cara yang berbeda baik secara lembut dan koersif. Pemberian janji pembangunan yang dilakukan Cina bagi wilayah Arakan dapat dikatakan sebagai suatu upaya antisipasi agar penduduk setempat menyetujui dan mendukung proyek pembangunan pipa gas Cina. Melalui program pembangunan ini diharapkan penduduk lokal setuju dan mendukung proyek tersebut karena pembangunan pipa tersebut mengundang investasi dari luar sehingga secara langsung dampak berdampak bagi peningkatan ekonomi dan peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah Arakan. Cina juga melakukan antisipasi pengamanan menghadapi kaum resistan yang dapat membahayakan kelancaran proses distribusi minyak tersebut. Dalam rangka mengantisipasi pergerakan kaum resistan yang semakin meluas, militer Myanmar melakukan penahanan dan penculikan pada oknum-oknum oposisi yang mereka anggap meresahkan. Dalam penahanannya, para aktivis ini diinterogasi dan dipukuli oleh tentara militer Myanmar.

## **Daftar Pustaka**

- Andrew T.H. Tan. "Ethnic Conflict in Burma: from Separatism to Federalism." dalam *A Handbook of Terrorism and Insurgencies in Southeast Asia*. (Northampton: Edward Elgar Publishing Inc., 2007).
- Anonim. *Massive Military Built Up at Ann (Arakan), and (Than) Shwe Gas Project*. Tersedia dalam <http://ann-arakan-military-builtup.blogspot.com/> (diakses pada 22 Desember 2013), 2011.
- Anonim. *Pipeline in Arakan Draws Protest*. Tersedia dalam <http://www.irrawaddy.org>, (diakses pada 29 November 2013), 2013.
- Anonim. tersedia dalam <http://moneymorning.com>. (diakses pada 21 Maret 2013),t.t.
- Anonim. tersedia dalam <http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135851-T%2028013-Kajian%20mengenai-Metodologi.pdf> (diakses pada 21 Maret 2013),t.t.

- Anonim. *The Myanmar-Cina Pipelines: Human Right Violations, Aplicable Law, and revenue Secrecy*. Dalam EarthRight International Situation Briefer No. 1. March 2011.
- Corben, Ron. *Rights Groups Call for Cina to Halt Construction of Pipeline in Myanmar*. Tersedia dalam <http://www.oilwatch.org>, (diakses pada 29 November 2013), 2009.
- Dalle, Jusman. *Dalang Lain Tragedi Rohingnya*. <http://jusman-dalle.blogspot.com/2012/08/opini-jawa-pos-dalang-lain-tragedi.html>. (diakses pada 21 Maret 2013), 2012.
- Devetak et al., *An Introduction to International Relations*. 2012. Pg. 492.
- Evans, G dan Newnham, J., *The Penguin Dicionary of International Relations*. (London: Penguin books, 1998)
- Joko Susanto. Kuliah Geopolitics of The New Emergent Economics Minggu XII: Geopolitics and Geoeconomics. Departemen Hubungan Internasional. Universitas Airlangga. 2013.
- Laura Neack. *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era*. (Maryland: Rowman & Littlefield Publisher. 2008) pg. 26
- Safiril A. Mubah. "Ancaman Krisis Energi di Balik Kebangkitan Ekonomi Cina." *Jurnal Global dan Strategis* 5:2 (2011).
- Saul Bernard Cohen. *Geopolitical Structure and Theory in Geopolitics of the World System*. (London: Rowman and Little Publisher, 2003) pg. 33-61.
- Shirk, 2007:293 dalam Mubah, Safiril A. "Ancaman Krisis Energi di Balik Kebangkitan Ekonomi Cina." *Jurnal Global dan Strategis* 5:2 (2011).
- Tatsu kambara dan Howe Christopher. *Cina and the Global Energy Crisis*. (Northampton: Edward Elgar, 2007).
- Thakuria, Nava. *Aktivis Myanmar Tolak Pipa Minyak Cina*. Tersedia dalam <http://erabaru.net> (diakses pada 03 Oktober 2013), 2009.
- Valerie M.Hudson. "The History and Evolution of Foreign Policy Analysis." dalam *Foreign Policy: Theories; Actor; Case*, ed. Steve Smith et al. (New York: Oxford University Press, 2008) pg. 12.
- Wu, Kang dan Storey, Ian. "Cina in the Global Capitalist System." dalam *Cina Emergent Political Economy: Capitalism in the Dragon's Lair*. (New York: Routledge, 2008).
- Yue, (2004), 51-53 dalam Mubah, Safiril A. "Ancaman Krisis Energi di Balik Kebangkitan Ekonomi Cina." *Jurnal Global dan Strategis* 5:2 (2011).